



## Perilaku Pemilih dalam Menentukan Keputusan Politik di Indonesia pada Awal Era Reformasi

<sup>1</sup>Syaripudin, <sup>2</sup>Rifandi Umaternate, <sup>3</sup>Muhammad Jundi Farhani, <sup>4</sup>Izzatusholekha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

---

### Abstract

Received: 20 Desember 2023  
Revised: 21 Desember 2023  
Accepted: 22 Desember 2023

*This study examines the political phenomena in Indonesia during the reform era, focusing on voter behavior in general elections. The reform era, which began with the fall of the New Order government in 1998, marked a transformation in the Indonesian political landscape, characterized by an increase in political freedom and the freedom to form political parties. Adopting the Public Choice Theory, this research analyzes data from the 1999, 2004, 2009, and 2014 elections to understand voter motivations. The findings indicate that voters tend to use a sociological approach in determining their political choices, with factors such as regional similarity, race, and loyalty to political parties as key influencers. These conclusions aim to provide insights into the post-reform era political dynamics and voter behavior in Indonesia.*

**Keywords:** *Reform Era, Voter Behavior, Public Choice Theory, Indonesian Elections, Political Dynamics*

(\*) Corresponding Author: [syaripudin@student.umj.ac.id](mailto:syaripudin@student.umj.ac.id)

**How to Cite:** syaripudin, syaripudin, Umaternate, R., Farhani, M., & Izzatusholekha, I. (2024). Perilaku Pemilih dalam Menentukan Keputusan Politik di Indonesia pada Awal Era Reformasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 866-880. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10521760>

---

### PENDAHULUAN

Runtuhnya kekuasaan era orde baru Tahun 1998 menjadi tonggak awal mulainya era baru, yaitu reformasi. Era reformasi ini disinyalir sebagai wujud runtuhnya era otoritarian dan munculnya era demokrasi di Indonesia (Arianto, 2011; Hambali, 2014). Oleh karena itu, era ini ditandai dengan peningkatan kebebasan politik. Peningkatan kebebasan politik tercermin dari kebebasan masyarakat untuk membentuk partai politik. Jumlah partai politik mengalami peningkatan secara signifikan pada era reformasi. Selain itu, jumlah partai politik peserta pemilu juga fluktuatif, karena adanya *fit and proper test* terhadap setiap partai politik peserta pemilu. Potret tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kebebasan berpolitik pada era reformasi.

Selain berdampak pada kebebasan dalam membentuk partai politik, reformasi juga berdampak pada kebebasan masyarakat dalam menentukan keputusan politik. Lili Romli menjelaskan bahwa pada masa orde baru, partisipasi politik masyarakat dimobilisasi oleh rezim penguasa, sedangkan pada era reformasi ini partisipasi politik hanya tergantung pada kemauan masyarakat (Arianto, 2011).

Pada era reformasi ini telah dilakukan pemilu sebanyak empat kali, yaitu pada Tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada Tahun 2009 akan diselenggarakan pemilu untuk menentukan calon presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pemilu yang telah diselenggarakan telah menghasilkan keputusan politik yang cukup beragam (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015).

Tidak ada satupun partai politik yang memenangkan disetiap pemilihan umum. Selama penyelenggaraan pemilu di era reformasi, belum ada satu pun partai politik yang memenangkan pemilu disetiap pemilihan. Maksimal mereka memenangkan dalam dua periode pemilihan. Itupun akibat sistem koalisi yang diterapkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak cukup fanatic terhadap keberadaan partai politik. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang muncul dibenak kita adalah tentang apa motif utama yang mempengaruhi Keputusan masyarakat?. Hal ini akan menggambarkan perilaku politik pemilih dalam menentukan keputusan politiknya. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap perilaku masyarakat Indonesia dalam menentukan Keputusan politik pada era reformasi. Semakin meningkatnya kebebasan dalam menentukan keputusan politik akan meningkatkan preferensi pemilih dalam menentukan keputusan politik yang pada akhirnya akan menentukan perbedaan perilaku dalam menentukan keputusan politik. Terselenggaranya pemilu sebanyak empat kali selama era reformasi dirasa sangat cukup untuk menggambarkan kecenderungan dan *trend* perilaku pemilih dalam menentukan Keputusan politiknya.

## **Teori**

### *Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory)*

Pilihan publik (*public choice*) juga sering kali disebut dengan teori ekonomi politik. Pilihan publik merupakan aplikasi pemikiran-pemikiran atau metode-metode ekonomi ke dalam teori dan praktek politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, teori ini sering digunakan untuk menganalisa berbagai fenomena politik dan pemerintahan seperti proses pembuatan kebijakan maupun proses pemilihan umum. Pada dasarnya pilihan public ini mempelajari bagaimana keputusan-keputusan yang melibatkan banyak orang (publik) itu dibuat. Namun, secara umum isi dari teori ini meliputi studi tentang perilaku politik.

Teori pilihan publik (*public choice theory*), atau yang dikenal sebagai pendekatan ekonomi politik baru (*new political economy approach*) berasumsi bahwa setiap keputusan yang diambil secara kolektif, maka termaktub didalamnya motif-motif individu. Hal ini mengakibatkan adanya pandangan bahwa setiap perilaku maupun tindakan birokrat, politisi, wakil rakyat, dan pihak berkepentingan selalu berpijak pada kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok dibandingkan dengan kepentingan umum. Pada akhirnya, teori ini memandang

bahwa memahami kepentingan-kepentingan aktor pengambil keputusan menjadi hal yang krusial dan perlu untuk dilakukan. Selain itu, teori ini juga sebagai antitesa dari pandangan-pandangan normatif yang sekaligus mendorong kita untuk senantiasa bersikap skeptis.

Teori pilihan publik memusatkan perhatian pada aktor (pengambil keputusan) dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai maksud dan kepentingan. Hal itu berarti bahwa setiap aktor memiliki kepentingan dan tujuan yang termaktub pada upaya yang mereka lakukan. Oleh karenanya, setiap keputusan yang diambil oleh setiap aktor menunjukkan preferensi, maksud, dan kepentingannya.

Teori ini menolak pandangan bahwa setiap keputusan publik yang diambil ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum (publik). Teori ini menggunakan tindakan, keputusan, atau pilihan yang diambil sebagai alat untuk memahami kepentingan atau tujuan dari setiap aktor. Setiap pilihan yang diambil selalu memiliki nilai dan karakteristik sendiri. Identifikasi terhadap nilai dan karakteristik tersebut menunjukkan motif mereka. Hal itu berarti bahwa walaupun mereka memiliki tindakan/keputusan yang mungkin terlihat memiliki keberpihakan atau kepedulian terhadap kepentingan umum, namun teori ini berasumsi motif utamanya pasti merujuk pada kepentingan pribadi. Muller mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk egois, rasional, dan selalu memaksimalkan manfaat serta bertekad memahami upaya yang menghubungkan cara-cara dan tujuan-tujuan seefektif mungkin. Teori pilihan publik tidak memusatkan perhatian pada subjek dalam pengambilan keputusan (siapa yang mengambil keputusan). Jadi, politik tidak dipandang sebagai sekumpulan institusi yang terdiri dari individu-individu yang berupaya untuk memenuhi kepentingan publik. Namun, teori ini politik sebagai sebuah arena untuk memenuhi kepentingan pribadi. Setiap institusi merupakan alat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan kata lain, politik tidak dipandang sebagai arena untuk mendapatkan kekuasaan semata (sebagaimana pandangan politik murni), melainkan – lebih jauh dari pada itu – politik sebagai arena untuk memenuhi kepentingan individu. Sebagai konsekuensinya, politik memungkinkan terjadinya pertukaran nilai diantara masyarakat (warga negara), pemerintah, dan mesin politik.

### **Pendekatan Perilaku**

Teori pilihan publik diatas menunjukkan bahwa fokus kajiannya terletak pada tindakan, pilihan,

dan perilaku dari setiap aktor pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, perilaku menjadi pusat perhatiannya. Dalam studi perilaku, khususnya perilaku memilih, setidaknya terdapat tiga model (*school of thought*) yang dapat digunakan, yaitu model

sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional. Adapun ketiga model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Model Sosiologis**

Model ini memusatkan perhatian pada pengaruh kelompok atau sekumpulan individu terhadap perilaku individu. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwasetiap individu selalu memiliki lingkungan sosialnya (seperti keluarga, tempat kerja, tempat tinggal, dan sebagainya) dan selalu terkait dalam lingkungan sosialnya tersebut. Untuk mampu bertahan dalam lingkungan sosialnya, setiap individu akan senantiasa menyesuaikan diri, sehingga perilakunya dapat diterima didalam lingkungan sosialnya.

Dalam konteks politik, menurut model ini, memilih bukanlah serratus persen merupakan pengalaman pribadi, tetapi merupakan pengalaman kelompok. Setiap individu dalam memilih memiliki kecenderungan untuk mengikutidan menyesuaikan arah pilihan kelompok sosialnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika upaya untuk mempengaruhi kelompok seringkali dilakukan melalui perang wacana (*discourse warfare*) dalam masyarakat. Wacana yang lebih dominan berpotensi penguasaiperilaku kelompok sosial. Hal ini seperti yang dilakukan oleh World Bank dan Canadian International Development Agency (CIDA) ketika berkepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Lesotho. World Bank dan CIDA menggunakan politik wacanan untukmempengaruhi pilihan pemerintah Lesotho dalam mengambil keputusan public (Ferguson, 1996). Perang wacana antara sarjana di Lesotho dengan World Bank danCIDA akhirnya dimenangkan oleh World Bank dan CIDA yang pada akhirnya mempengaruhi pemerintah Lesotho dalam mengambil keputusan publik.

Dalam cakupan yang lebih kecil, pendekatan ini, secara umum, mengidentifikasi peran orang tua dan keluarga sebagai faktor dominan yang mempengaruhi individu dalam memilih. Walaupundemikian terdapat faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi menyebutkan faktor kelas sosial yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, agama, dan tingkat religiusitas, ras, etnik, sentiment kedaerahan, domisili, yaituantara pedesaan dan perkotaan, jenis kelamin, dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012). Salah satu kajian yang membuktikan hal tersebut ditulis oleh Afan Gaffar dalam bukunya yang berjudul *Javanese Voters*. Perilaku memilih masyarakat Jawa lebih dipengaruhi oleh lingkungan agama dan keluarganya yang kemudian disebutnya sebagai sosio religious dan sosio personal (Gaffar, 1992). Sosio religious merujuk pada perilaku memilih masyarakat Jawa yang didasarkan pada kelompok aliran agama.

Sedangkan sosio personal merujuk pada perilaku memilih masyarakat Jawa yang mendasarkan diri pada hubungan paternalistik.

### **Model Psikologis**

Model psikologis tidak beranggapan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi pilihan individu dalam pengambilan keputusan. Model yang masuk dalam Mazhab Michigan ini mengungkapkan bahwa faktor sosiologis tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun faktor sosial yang dilekatkan pada partai atau calon tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya setiap individu sudah mengidentifikasi dirinya termasuk dalam satu golongan tertentu. Sehingga setiap individu sudah melakukan segmentasi pada kelompok tertentu dan melakukan pembatasan diri terhadap kelompok lainnya. Lebih lanjut, setiap individu pemilih juga memiliki anggapan bahwa partai atau *figure* tertentu identik dengan kelompok atau segmentasi sosial mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diidentifikasi bahwa pendekatan psikologis berpusat pada tiga fokus perhatian, yaitu: a) Persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, b) Persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan c) Identifikasi partai atau *partnership*.

Model ini berasumsi bahwa pilihan dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh struktur sosial, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat jangka pendek dan panjang. Oleh karena itu model ini mengusung orientasi terhadap isu dan tema sebagai konseptualisasi jangka pendek. Oleh karena itu, setiap partai politik maupun figur akan senantiasa memunculkan tema atau isu strategis yang ingin diusung. Dengan kata lain, wacana lagi-lagi menjadi bagian penting dalam mempengaruhi pilihan individu.

Walaupun terkesan tidak sepeham dengan model sosiologis, namun kenyataannya kedua model ini (model sosiologis dan psikologis) saling berkaitan satu sama lainnya. Konsep utama yang digunakan dalam model psikologis adalah melalui identifikasi partai. Proses identifikasi ini pada umumnya diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan baik oleh partai politik maupun figur melalui berbagai media seperti TV, pamflet, maupun media cetak lainnya. Proses sosialisasi ini pada akhirnya akan membentuk suatu ikatan psikologis individu dengan partai politik maupun figur. Hal ini terjadi walaupun individu tersebut bukanlah anggota partai atau kelompok kepentingan. Pada umumnya, perasaan itu tumbuh akibat pengaruh lingkungan keluarga, tempat tinggal, atau orangtua. Oleh karena itu identifikasi partai tersebut sangat berkaitan dengan kelompok sosial pemilih.

Lebih jauh lagi, pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi ini selanjutnya disebut sebagai pemberi suara reaktif (Nimmo, 2005). Hakekatnya, menurut Nimmo, perilaku manusia terstimulasi oleh rangsangan yang bersifat pasif

namun terkondisikan dan perilaku memilih setiap individu dibentuk oleh faktor sosial. Terdapat korelasi antara pengelompokan sosial dengan identifikasi partai. Pembentukan karakter yang ada didalam kelompok sosial mempengaruhi proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan partai maupun kandidat. Ikatan tersebut bisa didasarkan pada kedudukan, prestasi, dan popularitas kandidat maupun partai dalam masyarakat atau kelompok sosial dimana pemilih berada.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ikatan emosional menjadi faktor penentu dalam model ini. Sementara peran keluarga dan lingkungan dimana pemilih berada sangat signifikan dalam membentuk ikatan emosional tersebut melalui proses sosialisasi.

Selain itu, ketokohan juga sangat mempengaruhi perilaku pemilih dalam mengambil keputusan. Gerung dalam Nursal (2004) menyebutkan bahwa identifikasi adalah dorongan untuk identic dengan orang lain yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dianggap ideal dalam suatu segi. Oleh karena itu, adanya tokoh panutan juga menimbulkan identifikasi ini.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa model psikologis melihat perilaku pemilih merupakan produk dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional. Hal ini kurang mengarahkan pengambilan keputusan pemilih dalam suatu pemilihan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa besarnya pengaruh model ini dapat diukur dari dua indikator, yaitu ketokohan dan identifikasi partai. Indikator ketokohan dapat dilihat dari perilaku pemilih yang melandaskan diri pada identitas atau ketokohan calon dan tokoh yang dihormati oleh pemilih.

Sedangkan identitas partai dapat dilihat dari kesamaan persepsi pemilih dengan anggota keluarganya. Selain itu juga dapat dilihat dari kesamaan antara partai yang dikagumi dengan partai yang dipilih.

### **Model Pilihan Rasional**

Penjelasan dua model diatas menunjukkan bahwa pemilih sejak awal sudah memiliki pandangan tentang keputusan yang akan mereka ambil. Model sosiologis memperlihatkan jika pilihan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana pemilih berada. Sedangkan, model psikologis memandang bahwa pilihan individu dipengaruhi oleh ikatan emosional akibat proses sosialisasi. Kedua model tersebut mengindikasikan bahwa setiap pemilih sudah memiliki pilihan sebelum proses pertarungan politik dilakukan.

Walaupun demikian, pada kenyataannya, pilihan tersebut dapat berubah seiring dengan adanya proses persaingan politik. Berbagai peristiwa politik yang terjadi sebelum pemilihan dapat mengubah pilihan mereka. Selain itu, berbagai pertarungan wacana dan juga kemungkinan terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan (*welfare oportunity*) bagi pemilih juga memungkinkan

perubahan pengambilan keputusan pemilih. Hal inilah yang kemudian dijelaskan oleh model pilihan rasional.

Model pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan rasionalitas atau logika untuk memilih pilihan yang tersedia. Setiap pilihan akan diuji dan diukur menggunakan rasionalitas untuk memilih pilihan yang paling efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan. Dengan kata lain setiap pilihan akan dihitung untung dan ruginya bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) selalu menjadi alat utamanya untuk mencapai keputusan yang efektif dan efisien.

Sedangkan terkait dengan orientasinya, Nursal (2004) mengidentifikasi bahwa terdapat dua orientasi pemilih, yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu lebih memfokuskan pada ide, gagasan, program, maupun tema yang diusung dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Sedangkan orientasi kandidat berfokus pada ketokohan yang merujuk pada pribadi dan karakter kandidat. Apapun ide yang diusung tidak akan mempengaruhi pilihan masyarakat.

Berdasar tiga model diatas, model yang terakhir ini lah yang menjadi dasar dalam teori pilihan publik (*public choice theory*). Model terakhir (model rasional) ini yang dalam pengambilan keputusan disebut dengan teori pilihan rasional. Teori ini mendasarkan diri pada konsep rasionalitas yang menitikberatkan pada pemanfaatan logika dan keilmuan dalam proses pengambilan keputusan. Teori pilihan rasional ini – yang kemudian – menjadi dasar munculnya teori pilihan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan karakteristik obyek penelitian agar lebih mudah dideskripsikan. Dengan kata lain, peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena pemilihan umum di era reformasi untuk menggambarkan karakteristik perilaku pemilih di Indonesia. Sebagai konsekuensi, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan sejalan dengan penyelenggaraan pemilu. Hal itu karena peneliti merupakan pemilih aktif yang berpartisipasi dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap jalannya pemilu, baik secara langsung maupun melalui media masa. Sedangkan data dokumen berupa hasil pemilu Tahun 2004, 2009, dan 2014, serta hasil survey dari berbagai lembaga survey dikumpulkan melalui berbagai media

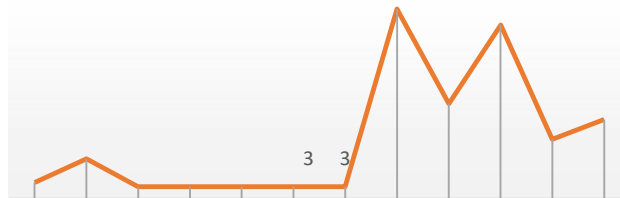
baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Untuk menggambarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan pada hasil penyelenggaraan pemilu presiden Tahun 2004, 2009, dan 2014. Hal itu karena pada tiga periode pemilu tersebut pemilihan presiden menggunakan sistem pemilihan langsung. Hal itu berarti bahwa setiap masyarakat menentukan pilihan politiknya secara langsung. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu pada tiga pemilu tersebut sangat mewakili upaya untuk mengidentifikasi perilaku pemilih dalam pemilihan umum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Pemilu di Indonesia di Era Reformasi**

Era reformasi ditandai dengan runtuhnya pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Hal ini diidentifikasi sebagai kebebasan berpolitik. Oleh karena itu, banyak muncul partai politik-partai politik baru peserta pemilu. Selain itu, jumlah partai politik peserta pemilu pada masa ini juga fluktuatif.



Gambar 1 Jumlah Partai Politik dalam Sejarah Pemilu di Indonesia  
Sumber: hasil analisis, 2021

Pada era reformasi, sampai Tahun 2018, pemerintah telah menyelenggarakan pemilu sebanyak empat kali dimana pemilu pertama di era tersebut diselenggarakan pada Tahun 1999. Walaupun demikian, tidak semua penyelenggaraan pemilu dilakukan menggunakan sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden baru terselenggara mulai pemilu Tahun 2004, dimana setiap individu dalam masyarakat Indonesia memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada pemilu Tahun 1999, pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh suara dilegislatif, atau dengan kata lain menggunakan sistem pemilu tidak langsung.

### **Penyelenggaraan Pemilu di Era Reformasi**

Berakhirnya orde baru diikuti dengan meningkatnya jumlah partai politik peserta pemilu. Hal ini sangat baik dalam proses demokrasi, karena memberikan lebih banyak alternatif pilihan pada masyarakat dalam menentukan pemimpin. Masyarakat diberikan lebih banyak pilihan pemimpin. Namun, disisi lain, hal itu

tentu saja memerlukan upaya yang lebih ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemimpin-pemimpin yang dicalonkan.

### **Pemilu Tahun 2004**

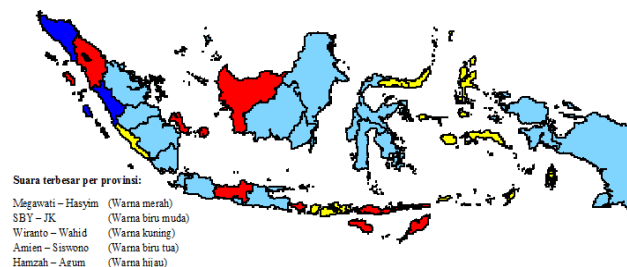
Pemilu 2004 merupakan pemilu pada masa keterbukaan dimana ini merupakan pemilu yang pertama untuk memilih perwakilan rakyat (DPR) dan pemerintah (presiden dan wakil presiden). Pemilu untuk memilih wakil rakyat baik pusat maupun daerah dilaksanakan tanggal 5 April 2004 dan diselenggarakan secara serentak. Ditingkat pusat, terdapat sekitar 550 kursi DPR dan 128 kursi DPD yang diperebutkan. Sedangkan kursi DPRD masing-masing daerah memiliki jumlah yang bervariasi.

Sedangkan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada dalam dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, dilanjutkan dengan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Penyelenggara Pemilu pada tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan, diantaranya Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik. Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dipilih dalam pemilu ini. Melalui sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk menentukan urutan posisi partai politik maupun kandidat yang akan dipilih. Sistem ini berbeda dengan sistem proporsional tertutup yang memberikan kewenangan kepada partai, pejabat partai, maupun konsultan untuk menentukan urutannya. Selain itu, sistem ini juga memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemilih dengan memberikan kebebasan kepada pemilih untuk secara langsung memilih kandidat (individu) dari partai. Dengan demikian, jumlah kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai politik ditentukan dari suara sah yang diperoleh oleh kandidat di masing-masing partai politik. Setiap kandidat harus memenuhi atau melebihi nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mendapatkan kursi.

Sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan sistem berpasangan. Partai politik atau koalisi partai politik dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih dalam pemilu. Syarat utama untuk dapat mengusulkan adalah partai politik atau koalisi partai politik harus mendapatkan suara sekurang-kurangnya 5% ditingkat nasional atau 3% kursi di DPR. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pemilihan anggota DPR dilakukan lebih dahulu dibandingkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari total suara dengan minimal 20% suara yang tersebar lebih dari 50% provinsi di Indonesia. Jika terjadi kasus dimana tidak ada

pasanganyang mencapai suara tersebut, maka dua pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua akan bertarung di putaran kedua. Pada putaran kedua ini, presiden dan wakil presiden terpilih adalah mereka yang mendapatkan suaraterbanyak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatdiketahui bahwa pemilu dua putaran hanya akan diselenggarakan jika tidak ada pasangan yang mendapat suara lebih dari 50% dari total suara dan 20% suaradi 50% provinsi di Indonesia (lihat Gambar 2).

Berdasarkan peta diatas dapat diketahui bahwa pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla menguasai suara paling besar dibandingkan dengan calon lainnya. Untuk Pulau Jawa, mereka memenangkandidaerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini karena Jawa Timur khususnya merupakan tempat kelahiran Susilo Bambang Yudoyono. Hal senada juga nampak didaerah pemilihan Sumatra yang merupakan daerah kelahiran Jusuf Kalla. Pasangan tersebut memenangkan didaerah Sumatra Utara.



Gambar 2 Hasil Pemilu Putaran I berdasarkan Wilayah Sumber: Pemilu. Asia, 2009

Walaupun demikian, lima pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada yang mendapatkan suara lebih dari 50% pada putaran pertama. Sebagai konsekuensinya pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan dua putaran. Adapun peserta pada putaran kedua tersebut adalah pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Yusuf Kalla dan pasangan Megawati Sukarno Putri dengan Hasyim Muzadi.

Hasil putaran kedua sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Jusuf Kalla (yang ditunjukkan dengan warna biru) mendominasi pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Hasyim Muzadi (yang ditunjukkan dengan warna merah). Pasangan yang disebut pertama mendapatkan 60,62% suara, sedangkan pasangan yang disebut kedua hanya mendapatkan 39,38% suara saja. Oleh karena itu, pasangan calon Susilo

Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalladitetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih.

Berdasarkan peta diatas, dapat diketahui bahwa Megawati Sukarno Putri dan Hasym Muzadi hanya memenangkan pertarungan di beberapa daerah saja seperti, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan Barat. Pasangan tersebut hanya memenangkan di daerah-daerah yang merupakan loyalis parta PDI- Perjuangan. Isu yang paling menentukan dalam pemilu ini adalah isu agama dimana dalam kalangan agama Islam meyakini bahwa pemimpin laki-laki lebih diutamakan dibanding dengan pemimpin wanita. Hal inilah yang kemudian di beberapa daerah seperti Jawa Timur yang merupakan basis PKB lebih memilih pasangan Susilo Bambang Yudoyono sebagai pemimpin.

### **Pemilu Tahun 2009**

Pemilu Tahun 2009 menggunakan sistem yang sama dengan pemilu Tahun 2004. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui sistem pasangandengan kemungkinan dua putaran. Namun, jika salah satu pasangan calon mendapatkan suara lebih dari 50%, maka akan secara otomatis menjadi pemenang pemilu.

Pemilu tahun 2009 diikuti oleh tiga pasangan calon, masing-masing adalah pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Boediono, Megawati Sukarno Putri dengan Prabowo Subianto, dan pasangan Jusuf Kalladengan Wiranto. Pasangan Bambang Susilo Yudoyono dengan Boediono diusung oleh lima partai, yaitu Demokrat, PKS, PPP, PAN, dan PKB. Dari kelima partai pengusung, empat diantaranya adalah partai dengan basis agama dengan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Sedangkan dua pasangan calon lainnya sama-sama diusung oleh partai dengan ideologi nasionalis dimana pasangan Megawati Sukarno Putri dengan Prabowo Subianto diusung oleh partai PDI-P dan Gerindra, sedangkan pasangan Yusuf Kalla dengan Wiranto diusung oleh partai Golkar dan Hanura.

Sebagaimana pemilu sebelumnya, isu agama ternyata sangat efektif dan berpengaruh besar terhadap kemenangan pemilu. Seluruh partai dengan basis agama terbesar di Indonesia mengusung pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Boediono. Hal itu mengakibatkan pasangan tersebut menang mutlak atas dua pasangan lainnya di putaran pertama. Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Budiono menang mutlak dibandingkan dengan pasangan yang lainnya. Pasangan SBY-Budiono mendapatkan suara lebih dari 50%. Secara lebih rinci dapat dilihat bahwa pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Boediono memperoleh suara 60,8%; Megawati Sukarno Putri dengan Prabowo Subianto memperoleh suara 26,76%; dan pasangan

Jusuf Kalla dengan Wiranto mendapatkan suara 12,41%. Gambar 4 juga memperlihatkan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Boediono menguasai memenangkan di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu berarti bahwa pasangan tersebut tidak perlu lagi bertarung pada putaran ke-2 dan langsung menjadi presiden dan wakil presiden RI.

Selain itu, unsur wilayah atau kesamaan demografi juga menentukan perilaku masyarakat dalam memilih. Hal yang paling mencolok dari pemilu Tahun 2004 dan 2009 adalah bahwa Megawati Sukarno Putri yang merupakan ketua umum PDI-P selalu memenangkan pemilihan di wilayah Bali. Bali merupakan basis pendukung partai PDI-P dengan loyalitas kepada Presiden I RI Sukarno. Hal itu menunjukkan loyalitas terhadap partai yang didasarkan pada kepercayaan pemilih sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa faktor-faktor emosional sangat mempengaruhi dan menentukan pembentukan perilaku politik dimana peran keluarga dan lingkungan sekitar individu yang berperan aktif dalam proses sosialisasinya. Dalam hal ini, pola hubungan yang merupakan bantuan budaya juga mempengaruhi emosional pemilih seperti hanya tokoh panutan yang menimbulkan identifikasi. Pengelompokan sosial dan demografi berkorelasi dengan identifikasi partai. Hal ini karena karakter kelompok sosial dan demografi dimana pemilih berada memberi pengaruh sangat penting dalam proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai. Simbol-simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dapat melekat pada simbol-simbol partai hingga tercipta identifikasi.

#### **Pemilu Tahun 2014**

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang merupakan pemilihan umum presiden ketiga di Indonesia. Pada pemilihan ini, Susilo Bambang Yudoyono tidak dapat maju kembali menjadi calon karena peraturan perundang-undangan melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Oleh karena itu, pemilihan ini diikuti oleh calon Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar pada lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam

hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Karena pada pemilu 2014 ini hanya diikuti oleh dua kandidat saja, maka dapat dipastikan bahwa pemilu tersebut diselenggarakan satu putaran saja. Berdasarkan hasil perolehan suara dapat dilihat bahwa pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan persaingan dengan memperoleh suara 53,15% atau jumlah suara mencapai 70.997.883. Dengan kata lain, pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla unggul 6,3% jika dibandingkan dengan pasangan Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa.

Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla unggul pada hampir semua wilayah di Indonesia. Keunggulan mutlak pasangan tersebut terutama terlihat di daerah Irian Jaya, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Persebaran perolehan suara kedua kandidat hanyaimbang di pulau Sumatera. Hal itu dapat dimengerti mengingat diantara kedua kandidat pasangan calon, masing-masing ada yang berasal dari pulau Sumatera, yaitu Hatta Rajasa pada pasangan nomor urut 1 dan Jusuf Kalla pada pasangan calon ke-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah.

Berdasarkan peta di atas sangat tergambar jelas sekali bahwa unsur kedaerahan dari mana calon tersebut berasal sangat mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih pemimpin. Joko Widodo misalnya, memenangkan persaingan di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah yang merupakan tempat kelahirannya. Hal senada juga terjadi pada pasangan Prabowo. Pasangan tersebut juga memenangkan pemilu di daerah kelahirannya, yaitu Jawa Barat.

Selain itu, faktor partai pendukung juga sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Fanatisme masyarakat terhadap partai politik juga sangat menentukan kemenangan pasangan calon. Daerah-daerah yang menjadi sentral atau basis partai tertentu akan memenangkan pasangan calon yang didukung oleh partai tersebut. Sebagai contoh Jawa Timur yang merupakan basis PKB. Pada daerah tersebut pasangan Joko Widodo mendapatkan perolehan suara melebihi pasangan calon Prabowo. Hal senada juga terjadi di provinsi Bali yang merupakan basis PDI-P.

## **KESIMPULAN**

Pemilu di Indonesia – khususnya pada era reformasi - telah menghadirkan banyak pemain dalam pemilihan presiden. Konsekuensi penyelenggaraan system demokrasi yang dicirikan dengan tidak adanya pembatasan partai dapat dijalankan

dengan baik. Selain itu, partai politik dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Hal itu membawa dampak positif terhadap masyarakat karena memberikan banyak pilihan kepada mereka untuk mengambil keputusan politik. Setiap masyarakat disajikan dengan banyaknya pilihan pemimpin.

Keputusan politik masyarakat menggambarkan motif masyarakat dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dapat mendeskripsikan perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan pendekatan sosiologis dalam menentukan keputusan politik. Hal itu ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemilu di era reformasi yang selalu dimenangkan oleh calon yang berasal daerah yang sama. Oleh karena itu, kesamaan kedaerahan maupun ras selalumenjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan keputusan politik. Hal itu wajar karena selain memberikan kebanggaan terhadap golongannya juga diharapkan kehadiran pemimpin dari golongan tertentu akan sangat menguntungkan masyarakat daerah tersebut. Pemimpin terpilih diharapkan dapat membantu mensejahterakan golongannya. Selain itu, loyalitas masyarakat terhadap sebuah partai politik juga sangat mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu, setiap partai politik hendaknya memfokuskan kegiatan untuk membentuk kepercayaan Masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2011). Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Era Reformasidi  
Indonesia. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2(2), 128- 140.
- Ferguson, J. (1996). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. University of Minnesota Press.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese Voters: A case Study of Election Under a Hegemonis Party System*. Gajah Mada University Press
- Hambali, M.A. (2014). Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia. *RECHSTAAT*, 8(1), 1-7.
- Ibrahim. (2009). *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. CV. Mandar Maju.
- Kurniasih & Rohmawati. (2013). Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (Studi Pemilihan Walikota Bandung). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(2), 234-261.
- Miles, B. & Huberman, M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian*. Rosda Karya . (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya.

- Mujani, S., Liddle, W. R., & Ambardi, K. (2012). *KuasaRakyat: Analisis Tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatid dan Presiden IndonesiaPasca Orde Baru*. Mizan Publika.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Remajapostdakarya
- Nursal, A. (2004). *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama
- Pemilu Asia. (2009). *Pemilu Presiden, Legislatif, Pilkada*. <http://www.pemilu.asia/?lang=ind&c=54&opt=12&s=68&id=20>
- Rachbini, Didik J. (2002). *Ekonomi Politik: Paradigmadan Teori Pilihan Publik*. Ghalia Indonesia.
- Subakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Yustiningrum, E., & Ichwanuddin, W. (2015). PartisipasiPolitik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117 – 13